

BAB II

SEJARAH HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA DAN AUSTRALIA

Hubungan diplomatik Indonesia dan Australia dibuka pada tahun 1949 dan Indonesia membuka hubungan diplomatik penuh pada tanggal 17 Maret 1950 dengan menunjuk Dr. Oesman Sastroamidjojo sebagai kuasa usaha “*ad Interim*” yang untuk sementara menempati Gedung Arsip Nasional di Canberra. Dr. Oesman kemudian kembali ke Indonesia tanggal 5 Juli 1950 dan digantikan oleh Oetoyo Ramelan sebagai Duta Besar Penuh. Kantor Perwakilan RI di Canberra pada saat itu berpindah-pindah. Pada bulan Agustus 1971 baru menempati kantor permanen yang ada saat ini di daerah Yarralumla, yang merupakan daerah lingkungan perwakilan-perwakilan asing di Canberra (RI, 2018).

Dasar – dasar hubungan Indonesia dan Australia relatif kokoh. Hal ini mengingat komitmen pemimpin kedua negara untuk mengembangkan *good-neighborliness*, adanya peluang untuk mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan serta terdapatnya instrument legal/normatif antara lain *Joint Declaration on Comprehensive Partnership (2005)* serta *Lombok Treaty (2006)*. Deklarasi *Comprehensive Partnership* memuat *roadmap* bagi pengembangan hubungan bilateral ke depan (*expand and deepen*) antara Indonesia dan Australia melalui forum-forum konkrit seperti IAMF (*Indonesia-Australia Ministerial Forum*). Sementara itu, *Lombok Treaty* memuat prinsip-prinsip penting, seperti penghormatan terhadap kedaulatan nasional, integritas wilayah serta komitmen kedua negara untuk tidak membiarkan wilayah masing-masing dijadikan sebagai *staging point* untuk mengusung tujuan separatism (RI, 2018).

Indonesia dan Australia merupakan dua negara dalam dua benua yang berbeda yaitu Benua Asia dan Benua Australia. Indonesia merupakan bagian dari Benua Asia yang terdiri dari berbagai pulau dan membentuk sebuah negara dengan jumlah penduduk ratusan juta orang. Sedangkan Australia merupakan benua yang berbentuk pulau yang memiliki wilayah yang luas dan terletak diantara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta diapit oleh kepulauan Asia Tenggara dan daratan Kutub Selatan.



Gambar 2. Peta Indonesia dan Australia

Benua Australia merupakan benua yang terisolasi karena letaknya jauh dari benua lainnya. Australia dibatasi oleh dua Samudra yang membatasi ketiga sisi negara tersebut. Pertama, Australia terletak diujung rute laut dunia, rute ini melintasi Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta melayani angkutan barang-barang ekspor ke luar negeri. Kedua, rute yang melintasi Samudra Pasifik ke benua Amerika Utara dan Hindia ke Jepang dan Asia Tenggara. Oleh karena itu, apabila rute-rute itu jatuh ketangan satu atau beberapa negara yang

bermusuhan dengan Australia, kedudukan Australia akan terancam karena kehidupan ekonomi Australia sangat tergantung pada perdagangan luar negeri (Soebadio, 2002).

Dua negara yang berdekatan secara geografis ini, dapat dikatakan memiliki perbedaan yang menyeluruh. Mantan Perdana Menteri Australia, Gareth Evans yang berpendapat bahwa *“tidak ada dua negara tetangga di dunia yang berbeda secara komprehensif seperti Australia dan Indonesia. Kami berbeda bahasa, budaya, agama, etnis, populasi dan berbeda dalam sistem politik, hukum, serta sosial”* (Singh, 2002).

A. Dinamika Politik dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Negara Indonesia bila dipandang dari bentuk politik dan pemerintahannya, bahwa negara Indonesia menjalankan sistem presidensial multipartai yang demokratis. Sama halnya dengan negara-negara demokrasi lainnya yang ada di dunia, sistem politik Indonesia berdasarkan pada asas trias politika, yaitu eksekutif, legislative, dan yudikatif (Vannisa, 2018).

Letak astronomis Indonesia berpengaruh pada mata pencaharian penduduk Indonesia. Keuntungan dari letak astronomis tersebut diantaranya adalah memiliki dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau, curah hujan yang cukup tinggi, selain itu karena Indonesia dilalui garis khatulistiwa maka wilayah Indonesia mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Keadaan ini tentu sangat berpengaruh dalam bidang pertanian selain dilihat dari tanahnya yang subur. Hal ini membuat penduduk Indonesia yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Tanaman pangan utamanya adalah padi. Mata pencaharian penduduk Indonesia adalah pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, industri, perhubungan dan pariwisata (Indonesia G. R., 2018).

Politik Luar Negeri Republik Indonesia (PLNRI) memiliki karakteristik dan gaya yang berbeda-beda disetiap periode pemerintahan. Periode orde lama PLNRI memiliki karakteristik berhubungan akrab dengan kubu negara-negara komunis, serta bergaya *Konfrontatif*. Periode orde baru PLNRI memiliki karakteristik berhubungan akrab dengan kubu negara-negara barat serta bergaya *Low Profile Kooperatif*. Sedangkan pada periode orde reformasi PLNRI memiliki karakteristik berkawan dengan semua negara dan bergaya *aktif diplomatis (bebas aktif)* (Windiani, 2013). Menurut Hatta, politik “bebas” berarti Indonesia tidak berada dalam kedua blok dan memilih jalan sendiri untuk mengatasi persoalan internasional. Istilah “aktif” berarti upaya untuk bekerja lebih giat guna menjaga perdamaian dan meredakan ketegangan kedua blok (Hatta, 1976).

Membahas masalah *gastrodiplomacy* tidak lepas dari peran makanan tradisional Indonesia yang merupakan makanan yang dikonsumsi oleh kelompok masyarakat dalam waktu tertentu, dibuat dengan resep turun temurun, diwariskan dari generasi ke generasi yang memiliki karakteristik tertentu dan berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain (Purwaningtyas, 2017).

Kuliner Indonesia merupakan identitas nasional yang menjadi bagian dari budaya masyarakat karena pengolahan makanan dan resep yang dijaga turun temurun. Kuliner Indonesia yang digunakan dalam teknik diplomasi kuliner merupakan upaya untuk mempromosikan budaya nusantara dengan menyisipkan elemen lokal dan ikon daerah Indonesia. Penyebutan ikon tersebut untuk memudahkan pemahaman negara luar yang menikmati kuliner Indonesia. Penggunaan nama-nama itu diantaranya gado-gado yang disebut “*Salad of Java*”, kerupuk yang disebut *Crackers*, bakso yang disebut “*Meat Ball*”, kerak telur yang disebut “*omelette*” dan masih banyak lagi lainnya. Hal ini tentu memudahkan dalam hal diplomasi

kuliner yang dicanangkan oleh pemerintah (Purwaningtyas, 2017).

Pembentukan kebijakan luar negeri Indonesia dapat dilihat dari aktor yang terlibat dalam pengambilan kebijakan luar negeri. Hal ini yang kemudian menentukan pola atau gaya diplomasi yang digunakan oleh pemerintah Indonesia. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri kental dengan terlibatnya aktor negara baik secara vertikal dan horizontal. Aktor vertikal yaitu pemerintah daerah dan aktor horizontal meliputi pemerintah pusat, jajaran kementerian dan legislatif. Selanjutnya tidak lupa juga lembaga Internasional, LSM atau NGO serta masyarakat sipil. Pembentukan profil kebijakan luar negeri Indonesia diawali dengan berubahnya landasan yuridis, konstitusi dan tindakan politik luar negeri Indonesia (Alami, 2015).

Peran aktor dalam berbagai kebijakan luar negeri Indonesia membantu meringankan tugas pemerintah untuk mencanangkan konsep diplomasi total dengan tujuan untuk melibatkan sektor masyarakat dalam profil diplomasi dan kebijakan luar negeri Indonesia. Diplomasi total bertujuan untuk sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan luar negeri yang integratif dalam perspektif yang intermestik (internasional-domestik). Hal ini menandakan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia tidak hanya sebagai domain kementerian luar negeri, tetapi melibatkan masyarakat sebagai bagian dari diplomasi total. Konsep ini diaplikasikan dalam bentuk kegiatan *foreign policy breakfast* yaitu forum yang mengundang berbagai *stakeholder* untuk membahas isu-isu yang berguna untuk memberikan data dan informasi bagi perumusan kebijakan luar negeri Indonesia (Alami, 2015).

Kebijakan luar negeri Indonesia memiliki arti dan peran yang sangat signifikan karena perpolitikan dunia pasca Perang Dingin tidak menentu sehingga mewajibkan

penyelenggara negara lebih kompleks dalam menghadapi isu-isu dunia. Pemerintah harus menghadapi berbagai isu seperti demokrasi, hak asasi manusia, masalah keamanan energi, masalah lingkungan hidup, kejahatan transnasional dan pelanggaran batas negara. Perlunya peran legislatif dalam perumusan serta pengambil keputusan kebijakan luar negeri merupakan suatu representasi dari masyarakat Indonesia. Perlunya pertimbangan legislatif dalam pengangkatan duta besar, perlunya pertimbangan legislatif dalam penerimaan duta besar negara lain, pembukaan dan pemutusan hubungan diplomatik serta sikap serta tindakan untuk memutus keanggotaan dalam organisasi Internasional (Alami, 2015).

Selanjutnya kebijakan luar negeri Indonesia sering dilakukan melalui diplomasi parlementer yang diwujudkan dalam bentuk kunjungan bilateral. Jenis diplomasi ini dilakukan dalam bentuk studi banding atau kunjungan kerja keluar negeri. Hal ini sebagai amanat dari peraturan perundang-undangan yang harus dilakukan meskipun sering mendapat kritikan karena besarnya biaya yang dikeluarkan. Selain itu kebijakan luar negeri Indonesia dilakukan dengan melakukan pencarian informasi dengan mendatangkan narasumber atau informan dari negara tertentu untuk memberikan pelatihan atau seminar di Indonesia. Selain legislatif terdapat pemerintah daerah yang berkontribusi dalam membentuk profil kebijakan luar negeri Indonesia. Derasnya arus globalisasi memaksa pemerintah daerah untuk mengambil peran sebagai pihak yang turut melakukan interaksi dengan dunia Internasional. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah. Kewenangan pemerintah daerah biasanya dilakukan dalam skema kerjasama bilateral dengan pihak luar negeri berupa kerjasama provinsi atau kabupaten dengan program "*Sister City*". Kerjasama ini meliputi bantuan

kemanusiaan, kerjasama penyertaan modal dan kerjasama lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Alami, 2015).

B. Dinamika Politik dan Kebijakan Luar Negeri Australia

Sistem pemerintahan yang dianut oleh Australia adalah sistem pemerintahan Monarki Konstitusional Federal yang mengakui Ratu Inggris sebagai Kepala Negaranya atau sering disebut dengan Commonwealth Realm. Berbeda dengan negara persemakmuran Inggris lainnya, Australia menyebut Ratu Inggris sebagai Ratu Australia. Ratu Australia ini diwakili oleh seorang Gubernur Jenderal yang ditunjuk oleh Ratu atas rekomendasi dari Perdana Menteri Australia. Sedangkan kepala pemerintahan Australia adalah Perdana Menteri yang pada dasarnya adalah pemimpin partai atau koalisi terbesar setelah pemilihan umum legislative (Dickson, 2018).

Tujuan dasar politik luar negeri Australia adalah menjaga integritas dalam lingkungan internasional yang saling bersaing. Integritas suatu bangsa bukan hanya mencakup perlindungan terhadap aset-aset yang penting seperti wilayah teoriti, SDA dan SDM dalam batas negara tetapi juga memelihara sistem ekonomi, politik, sosial, budaya, masyarakat yang turun menurun secara singkat. Hal tersebut disebut dengan etos fisik dan sosial dari sebuah negara. Ada dua kelompok yang membangun etos nasional Australia yaitu *pertama* adalah campuran antara nilai budaya, etika, agama dan etnis yang menentukan sikap dan moralitas masyarakat. *Kedua*, campuran antara nilai, sosial, politik dan ekonomi yang dipelihara oleh masyarakat dalam aturan-aturan administrative (upi, 2018).

Di bidang perekonomian, Australia merupakan negara maju dengan pendapatan perkapita yang tinggi

yaitu sebesar US\$48.700,- dan angka kemiskinan yang sangat rendah. Sedangkan Pendapatan Domestik Bruto adalah sebesar US\$1.188 triliun. Jumlah PDB Australia tersebut menduduki urutan ke-19 sebagai negara dengan PDB terbesar di Dunia. Komoditas ekspor utama Australia adalah batu bara, emas, alumina, daging, wol, gandum dan peralatan-peralatan transportasi. Australia menandatangani perdagangan bebas dengan beberapa negara seperti China (Tiongkok), Korea Selatan, Jepang, Chili, Malaysia, Singapura dan Selandia Baru. Australia juga berperan aktif dalam beberapa organisasi ekonomi internasional seperti WTO, APEC, G-20 dan beberapa forum-forum ekonomi internasional lainnya (Dickson, 2018).

Beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Australia sebagaimana dibawah ini : (2001 : 22-39)

1. Faktor Sejarah dan Demografis

Terkait faktor kebijakan luar negeri Australia dipengaruhi oleh dua Negara yaitu Inggris dan Amerika Serikat. Pada tahun 1787 Australia diklaim merupakan sebagian dari wilayah Inggris oleh Kapten James Cook (Bhakti, 2001). Wilayah ini digunakan Inggris untuk tempat pembinaan narapidana. Pada tanggal 26 Januari 1788, Inggris mengirimkan sejumlah narapidana ke Australia dan sejak saat itu Australia menjadi tempat pembinaan narapidana Inggris (Hamid, 1999). Hal ini berlangsung hingga 8 tahun kemudian tepatnya pada 1796 berkembangnya wilayah Australia menjadi wilayah peternakan membuat migrasi yang terjadi cukup besar. Imigrasi Inggris berdatangan yang berprofesi sebagai petani, peternak dan lain-lain. Semakin berkembangnya ekonomi, masyarakat dan politik membuat Inggris mengambil kebijakan untuk membentuk pemerintah Koloni Australia hingga menjadi negara Federal Australia pada tahun 1901. Meskipun telah menjadi

negara Federal, semua kebijakan Australia ditentukan oleh Inggris yang kemudian pada tahun 1935 Federasi Australia membentuk kantor untuk urusan luar negeri dan pada tahun 1940 Australia membuka kedutaan luar negeri (Bhakti, 2001).

Kedatangan imigran Inggris ke Australia membuat pemikiran masyarakat Australia dipengaruhi oleh identitas masyarakat Inggris. Hal ini tidak terlepas dari sikap Inggris yang melakukan perlindungan terhadap Australia, melakukan perdagangan luar negeri dengan Australia, membangun hubungan luar negeri dengan Australia, model pendidikan di Australia yang sama dengan Inggris, hingga budaya-budaya keinggrisan yang tidak dapat dihilangkan (Siboro, 1996). Tetapi hingga Perang Dunia ke II, Inggris tidak lagi menjadi pelindung Australia karena Inggris fokus terhadap negaranya serta mengamankan wilayah jajahannya dari serangan Jepang (Siboro, 1996). Akibatnya Australia turut ikut berperang ketika Singapura yang merupakan wilayah jajahan Inggris diserang oleh Jepang pada 15 Februari 1942. Serangan tersebut merupakan ancaman nyata bagi Australia karena wilayah Australia yang berdekatan dengan Singapura dan Indonesia. Namun dengan bantuan Amerika Serikat, wilayah Australia dapat terhindar dari serbuan Jepang. Atas dasar hal itu, dukungan Australia kepada Inggris dipindahkan kepada dukungan Australia kepada Amerika Serikat (Siboro 1996).

Pengaruh kebijakan Amerika Serikat turut mempengaruhi sikap Australia karena dukungan penuhnya terhadap Amerika. Ketika Belanda menentang segala upaya Integrasi Papua ke Indonesia pada tahun 1950 sampai 1960, Australia mendukung integrasi Papua ke Indonesia karena Amerika dan Inggris khawatir Indonesia akan jatuh kepada

pengaruh komunis (Firth, 2005). Selain itu terkait kebijakan luar negeri Australia atas Timor Timur pada 1975-1999 turut dipengaruhi oleh kebijakan Amerika Serikat atas Timor Timur. Pengaruh Amerika Serikat ini terus berlanjut sampai Pemerintah Howard dari partai liberal yang mengklaim bahwa Australia merupakan deputi serif Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik (Wuryandari, 2001).

Kebijakan luar negeri Australia pada masa Pemerintahan Howard sangat bergantung kepada kebijakan Amerika Serikat. Kebijakan Australia dapat dilihat ketika terjadi permasalahan krisis ekonomi di kawasan ASEAN pada tahun 1997 yang menyebabkan perekonomian beberapa negara di kawasan Asia Tenggara menjadi terpuruk. Kasus terorisme yang terjadi di Amerika Serikat pada 2001 juga menjadi agenda politik luar negeri Amerika Serikat menjadi perang melawan terorisme. Kasus peledakan Bom Bali pada 2002 dan peledakan Bom di depan Kedutaan Besar Australia pada 2004 menjadikan kebijakan Australia berada dibawah payung keamanan Amerika Serikat (Mariyah, 2005).

Kebijakan luar negeri Australia juga dipengaruhi oleh faktor geografis. Australia menempati lokasi yang strategis di wilayah Asia Tenggara dan Samudera Pasifik. Bagian barat Australia berbatasan dengan Samudera Hindia yang merupakan jalur transportasi yang menghubungkan Australia dengan benua Afrika. Bagian utara berbatasan dengan wilayah Asia Tenggara bersama Indonesia dan Papua Nugini sebagai penyangga utama. Bagian timur berbatasan dengan kawasan Samudera Pasifik yang menghubungkan bagian selatan dan utara Benua Amerika. Sisi utara merupakan titik kekuatan dan kelemahan utama, hal

ini menyebabkan Indonesia memiliki posisi strategis dan penting untuk Australia (Hamid, 1999).

Kedekatan wilayah Australia dengan kawasan Asia Tenggara merupakan sebuah ancaman bagi Australia. Jauhnya wilayah Inggris dan Amerika Serikat terhadap Australia menyebabkan Australia membuat kebijakan “Mencari Keamanan dari Asia” (Bhakti, 2001). Bergabungnya Inggris dengan Uni Eropa pada 1972, menyebabkan turunnya ekspor Australia ke Inggris. Hal ini menimbulkan kesadaran bahwa masa depan ekonomi Australia bergantung pada negara-negara Asia khususnya Jepang dan Cina. Munculnya pandangan bahwa abad 20 merupakan abad Asia serta munculnya raja-raja ekonomi dari Asia menyebabkan Australia mengubah kebijakannya dari “Mencari Keamanan dari Asia” menjadi “Mencari Keamanan dalam Asia”. Perubahan ini terus terjadi hingga saat ini (Bhakti, 2001).

Perubahan kebijakan ini membuat semakin membaiknya hubungan Australia dan Indonesia, Hal ini terus terjadi pada masa pemerintahan Paul Keating yang menyatakan bahwa tidak ada yang lebih penting dari Australia daripada membangun hubungan baik dengan Indonesia dan memelihara serta menjamin hubungan baik tersebut. Hal ini dikatakan Paul Keating pada pidato Kenegaraan pada tanggal 16 Maret 1994 (Ryan 1995 : 2001).

C. Peristiwa-peristiwa yang terjadi antara Hubungan Indonesia dan Australia

Hubungan Indonesia dan Australia selalu mengalami naik turun. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia memicu permasalahan yang menyebabkan hubungan kedua negara menjadi naik turun. Peristiwa tersebut diantaranya masalah Timor-Timur pada tahun 1999, Bom Bali yang terjadi pada 12 Oktober 2002 serta

penyadapan yang dilakukan oleh pemerintah Australia terhadap beberapa pejabat tinggi di Indonesia. Hal ini menyebabkan ketegangan hubungan Indonesia dan Australia. Penulis menjabarkan sejarah hubungan Bilateral Indonesia dan Australia sejak era orde lama hingga pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

1. Orde lama

Hubungan Indonesia dengan Australia pada masa pra kemerdekaan bisa dikatakan baik karena Australia mendukung Indonesia secara penuh untuk merdeka dari penjajahan Belanda. Hal ini dilihat dari upaya Australia meminta bantuan kepada dewan keamanan PBB supaya menghentikan Agresi Militer Belanda terhadap Indonesia. Agresi Militer Belanda yang terjadi pada bulan Juli tahun 1947, menyebabkan Australia merupakan negara pertama yang bersimpati kepada Indonesia atas tuntutan merdeka secara Internasional. Hingga akhirnya Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia meskipun harus mengalami permasalahan perebutan Irian Barat pada masa itu (Hutama, 2017).

Pada masa perebutan tersebut, hubungan Indonesia dengan Australia sempat memburuk karena Indonesia tetap kukuh mempertahankan Irian Barat. Dalam hal ini Australia menentang Irian Barat masuk kedalam wilayah Indonesia dan lebih setuju jika Irian Barat menjadi kekuasaan Belanda. Selain itu permasalahan selanjutnya adalah Australia merupakan negara yang turut andil dalam menggagalkan Indonesia untuk menguasai Brunei, Sabah dan Sarawak tahun 1961-1965. Pengepungan yang dilakukan pasukan TNI terhadap angkatan laut Malaysia digagalkan Militer Australia yang bekerjasama dengan Militer Inggris, India dan Malaysia. Kurang lebih sebanyak 2.000 Prajurit tewas

dalam pertempuran di Kalimantan Utara tersebut (Hutama, 2017).

Perubahan yang terjadi di Australia adalah ketika Spender dari Partai Liberal menjabat sebagai Menteri Luar Negeri yang menganggap bahwa Irian Barat adalah *pertama* merupakan pertahanan terakhir Australia dari adanya serangan melalui arah utara. *Kedua*, masa depan Irian Barat merupakan faktor penting untuk mendukung kemajuan Australia. *Ketiga*, Irian Barat tidak pantas untuk Indonesia karena Indonesia saat itu sedang masif eksistensi Partai Komunis Indonesia, sedangkan Australia anti terhadap komunis. Permasalahan Irian Barat akhirnya selesai setelah ditandatanganinya persetujuan New York pada tanggal 15 Agustus 1963 oleh Menteri Luar Negeri Belanda dan Indonesia yang menyatakan bahwa Irian Barat merupakan wilayah Indonesia (Hutama, 2017).

2. Orde Baru

Era Orde Baru merupakan upaya perbaikan hubungan bilateral yang dilakukan Pemerintah Indonesia terhadap Pemerintah Australia. Saat itu berbagai kerjasama disepakati baik politik, ekonomi, sosial dan budaya. Pada bidang Politik Luar Negeri, Australia mendukung langkah Indonesia mengintegrasikan Timor-Timur ke Indonesia untuk menekan perkembangan Ideologi Komunis di Timor-Timur. Namun harmonisasi hubungan Indonesia dengan Australia tidak berlangsung lama karena tewasnya lima jurnalis Australia ketika meliput operasi Seroja. Pasca terintegrasinya Timor-Timur ke Indonesia pada tahun 1978, Australia menuduh Indonesia melakukan pelanggaran HAM berat ketika melakukan operasi Seroja. Selanjutnya Australia menuduh Indonesia melakukan pelanggaran HAM berat di Papua. Hal tersebut mengakibatkan adanya embargo oleh Amerika Serikat terhadap Kopassus

yang dicap sebagai pasukan tidak berprikemanusiaan (Hutama, 2017).

3. Reformasi

Hubungan Indonesia dan Australia kembali panas pasca referendum kemerdekaan Timor-Timur dari Indonesia pada tahun 1999. Presiden B.J. Habibie mengaku mendapatkan tekanan dari Perdana Menteri Australia saat itu yaitu John Howard. Tekanan tersebut disampaikan dalam sebuah surat yang menyatakan bahwa Indonesia harus segera melepas Timor-Timur karena Australia akan mendukung penuh kemerdekaan Timor-Timur atas Indonesia. Selain itu, Australia juga mengirimkan pasukan perdamaian untuk mengamankan pelaksanaan referendum yang dianggap sebagai sebuah penghinaan terhadap Indonesia yang meragukan kemampuan keamanan Indonesia (Hutama, 2017).

4. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

Era Pemerintahan SBY, Indonesia melakukan kerjasama dengan Australia terkait isu penyelundupan manusia. Kerjasama ini merupakan kunci bagi Australia yang sedang mengupayakan penghentian aliran pencari suaka yang tiba di Australia dengan menggunakan perahu Indonesia. Kerjasama ini tidak berlangsung lama pasca mata-mata Amerika, Edward Snowden membocorkan rahasia bahwa Australia pernah mencoba menyadap telepon genggam Presiden SBY, istri dan para menteri. Presiden SBY mengecam Perdana Menteri Australia saat itu, Tony Abbot. Namun, Pemerintah Australia justru tidak menunjukkan penyesalan atas tuduhan upaya penyadapan oleh Pemerintah Australia meskipun laporan penyadapan itu dimunculkan oleh media-media Australia (Australian Broadcasting Corporation, 2013).

Pencari suaka merupakan isu yang terus menerus menjadi pembahasan di Australia. Upaya penghentian masuknya pencari suaka ke Australia merupakan salah satu program prioritas Tony Abbot. Ketika Pemilu memang Tony Abbot mengkampanyekan untuk membendung pencari suaka dan memerintahkan kapal pengangkut pencari suaka untuk kembali ke Indonesia. Hal ini membuat Presiden SBY menanggukkan beberapa perjanjian selain Tony Abbot yang menolak minta maaf atas sikapnya. Tony Abbot juga menyampaikan bahwa operasi mata-mata yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada era 1998 merupakan kesalahan masa lalu yang mengharuskan Pemerintah Indonesia juga meminta maaf. Bocoran dokumen milik ABC dan surat kabar The Guardian mengatakan bahwa intelejen Australia pernah melacak aktivitas telepon genggam milik Presiden SBY selama 15 hari pada Agustus 2009 (Australian Broadcasting Corporation, 2013).

Meskipun hubungan Australia yang bertetangga dengan Indonesia mengalami pasang surut, tetapi hubungan keduanya merupakan hubungan yang unik. Dikatakan demikian karena dalam menjalin kehidupan bertetangga terdapat dua sisi yang berbeda diantara keduanya untuk mempererat hubungan kedua negara tersebut. Pada satu sisi terdapat berbagai ancaman yang dapat mengakibatkan kerenggangan hubungan keduanya. Perbedaan ideologi politik, budaya, ras dan tingkat pembangunan teknologi yang berkembang yang menyebabkan hubungan keduanya merupakan hubungan yang unik. Dari aspek sejarah hubungan Indonesia-Australia memiliki sisi *amity* dan *enmity* yang kuat dengan aspek *enmity* lebih kuat. Hubungan sangat akrab dengan dukungan Australia kepada Indonesia ketika menghadapi Belanda. Richard Kirby

juga bersedia menjadi mediator dalam konflik Indonesia-Belanda (Setyawati, 2015).

Sebagaimana disebutkan dalam *Strange Neighbours : Indonesia-Australia Relationship* bahwa Indonesia dan Australia memiliki kemiripan dalam budaya dan kemajemukan termasuk hal keamanan dan kepentingan nasional. Selama ini Australia menghindari politik luar negeri untuk menghindari ketegangan dengan menciptakan stabilitas dan keamanan di kawasan. Indonesia dan Australia meningkatkan hubungan dengan melakukan pertukaran budaya, pendidikan serta *Consultative Council* untuk mencegah konflik diantara kedua negara.